



Jasiora : Vol. IV No. 04 Juni 2022

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora

(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admnggr/index>)



TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DUSUN SEBERANG JAYA KECAMATAN BATHIN II PELAYANG KABUPATEN BUNGO

Joko Sunaryo,¹ Dowindra,² H.M.Chotib,³ Darmawanto,⁴ Deni Handani,⁵

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: jokosunaryo21@gmail.com

²STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: dowindra@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: mh.chotib@gmail.com

⁴STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: darmawanjapung@gmail.com

⁵STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: denihandani91@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 14 Mei 2022

Diterima: 28 Mei 2022

Terbit: 25 Juni 2022

Keywords:

Transparency, Use of Village Funds

Knowledge; Copyrights

Abstract

The background of this research is that there are indications that the implementation of activities is not installed with development information boards and development activities carried out by the hamlet government are not in accordance with the Budget Plan (RAB) or a predetermined plan. The purpose of this study was to determine the transparency of the government of Dusun Seberang Jaya in managing village funds. The method used in this research is descriptive qualitative. The population in this study is the Dusun government and BPD Seberang Jaya and community leaders. The sample amounted to 9 people who were taken by purposive sampling technique. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study revealed that the government of Dusun Seberang Jaya in managing village funds did not refer to the principle of transparency in the management of village funds. This can be seen from the fact that not all people know about the schedule for the preparation of hamlet development activities and there are still hamlet development activities that are not equipped with development information boards. In addition, the community still has difficulty obtaining or accessing information in a ready, easy and timely manner related to the budget plan for hamlet development activities. The government of Dusun Seberang Jaya only provides information on the total amount of the budget through the APBDus information board and has not been able to utilize information technology to meet all the information needs that the community wants because they are still experiencing limited human resources and other facilities and infrastructure.

Kata kunci:
*Perlindungan; Transparansi,
Penggunaan Dana Desa*
Corresponding Author:
Joko Sunaryo E-mail:
jokosunaryo21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ada indikasi terdapat pelaksanaan kegiatan tidak dipasang papan informasi pembangunan dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui transparansi pemerintah Dusun Seberang Jaya dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini ialah pemerintah Dusun dan BPD Seberang Jaya dan tokoh masyarakat. Sampel berjumlah 9 orang yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya dalam pengelolaan dana desa belum mengacu pada prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari belum semua masyarakat mengetahui tentang jadwal penyusunan kegiatan pembangunan dusun dan masih terdapat kegiatan pembangunan dusun tidak dilengkapi dengan papan informasi pembangunan. Selain itu masyarakat masih mengalami kesulitan untuk memperoleh atau mengakses informasi secara siap, mudah dan tepat waktu terkait dengan rencana anggaran kegiatan pembangunan dusun. Pemerintah Dusun Seberang Jaya hanya memberikan informasi jumlah keseluruhan anggaran melalui papan informasi APBDus dan belum dapat memanfaatkan teknologi informasi guna memenuhi semua kebutuhan informasi yang diinginkan masyarakat karena masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana lainnya.

DOI: 10.5281/zenodo.6674017

1. Pendahuluan

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga. Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pembangunan desa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa merupakan unsur yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Tetapi selama ini pemerintahan desa kurang mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini dapat menyebabkan banyaknya desa yang tertinggal di seluruh pelosok Indonesia. Untuk meminimalisir hal tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa setiap desa akan memperoleh dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Ayumiati (2019:62) menyatakan bahwa dalam penyelenggarannya, sistem pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur, menjalankan dan melaksanakan

kepentingan masyarakat.¹ Desa juga mempunyai peranan penting dalam otonomi daerah dan berpijak pada prinsip *good governance* dengan prinsip efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas serta demokrasi dalam pelaksanaan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli yang menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi: Pertama, tujuan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan dipedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan pada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, kultural dalam meningkatkan kualitas hidup pada umumnya di masyarakat desa. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam meningkatkan pembangunan dan mengembangkan pembangunan. Dengan demikian hal tersebut berdampak pada masyarakat yang menuntut pemerintah desa dapat menjalankan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan prinsip *good governance*.

Tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Sehubungan dengan hal itu maka peran aparatur pemerintah desa menjadi penting dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa khususnya penggunaan dana desa. Maka dari pada itu salah satu hal yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa adalah prinsip transparansi.

Menurut Atmadja (2013:19) transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran bagi setiap organisasi pemerintahan. Transparansi merupakan organisasi yang menyediakan informasi secara terbuka yang menyangkut informasi yang relevan serta mudah di akses dan di fahami oleh pemangku kepentingan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai². Dengan demikian pentingnya transparansi dalam penggunaan dana desabertujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran desa oleh pemerintahan desa. Sebagaimana diketahui saat ini pada beberapa desa yang ada di Indonesia terjadinya berbagai permasalahan atau dengan kata lain melakukan penyalahgunaan anggaran khususnya dana desa.

Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut tidak terlepas dari beberapa permasalahan klasik yang dialami seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan anggaran dana desa sehingga menimbulkan permasalahan sehingga membuat aparatur pemerintah desa harus berurusan dengan penegak hukum.

Dusun Seberang Jaya merupakan salah satu dusun yang berada diwilayah kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yang mendapatkan anggaran yang mencapai lebih dari satu setengah milyar setiap tahun. Anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Salah satu anggaran yang cukup besar bersumber dari APBN yaitu dana desa. Jumlah dana desa Dusun Seberang Jaya tahun 2020 mencapai Rp. 761.573.000,-.

Prioritas pengelolaan Dana Desa harus di dasarkan pada prinsip keadilan yang mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakannya. Selain itu juga diprioritaskan untuk kebutuhan kepentingan masyarakat desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat serta mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Namun, prioritas-prioritas tersebut hanya peraturan belaka bagi pemerintahan desa dalam mengalokasikan Dana Desa sehingga berakibat pada penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu dana desa belum sesuai dengan harapan, atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain belum melaksanakan prinsip transparansi. Sebagaimana hal tersebut diketahui bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya kurang terbuka kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Hal ini terlihat dari adanya dugaan masyarakat bahwa kegiatan

¹ Ayumiati. dkk. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun*, Jurnal EMT KITA, 2019. hal 62

² Atmadja, A. T. dkk. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2013. hlm 61

pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya karena pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintah dusun tidak memasang papan informasi pembangunan.

Selain itu pada observasi selanjutnya peneliti juga menemukan bahwa ada indikasi aparat pemerintah Dusun Seberang Jaya belum terbuka dalam penggunaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan jumlah anggaran yang dikelola untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Dengan demikian peneliti menduga bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian hal ini yang menjadi salah satu penyebab timbulnya prasangka dan praduga dari masyarakat sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dusun.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa fenomena permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Ada indikasi bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan tidak dipasang papan informasi pembangunan.
2. Ada indikasi bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Atas kasus tersebut tertarik rasanya mengkaji lebih mendalam bagaimana “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Dusun Seberang Jaya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Aparatur Pemerintah Dusun, BPD dan Masyarakat Dusun Seberang Jaya. Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 9 (Sembilan) orang yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

3. Hasil Dan Pembahasan

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo:

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sendiri merupakan salah satu dana yang termasuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus). Berkaitan dengan hal tersebut berikut peneliti jabarkan APBDus Seberang Jaya Tahun 2018 s/d 2020 kedalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.2
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus) Seberang Jaya
Kecamatan Bathin II Pelayang Tahun 2018 s/d 2020

No.	Tahun	Rincian Pendapatan			APBDus (Rp)
		Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-lain Pendapatan (Rp)	

1	2018	674.502.000	455.782.800	353.696.661	1.483.981.461
2	2019	747.735.000	487.669.800	332.365.316	1.567.770.116
3	2020	761.573.000	453.990.300	346.636.003	1.562.199.303

Sumber: Pemerintah Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang, 2021

Berkaitan dengan hal tersebut untuk melihat transparansi penggunaan dana desa di dusun Seberang Jaya, maka peneliti menggunakan indikator atau tolak ukur yang terdiri dari tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Tersedianya Informasi

Tersedianya Informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik maksudnya adalah pada saat tahapan penyusunan kegiatan, pemerintah Dusun Seberang Jaya dapat memberikan informasi terkait dengan jadwal penyusunan RKPDus dan APBDus kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyusunan tersebut. Sedangkan maksud dari implementasi kebijakan publik adalah pemerintah Dusun Seberang Jaya pada saat pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa berupa kegiatan pembangunan dusun dapat memberikan informasi terkait dengan jumlah anggaran serta standar kualitas pembangunan yang telah direncanakan melalui papan informasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Marlina selaku Datin Dusun Seberang Jaya. beliau mengatakan bahwa:

"...dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kegiatan pemerintah dusun, baik itu penyusunan RKPDus dan APBDus, saya selalu mengarahkan kepada perangkat dusun untuk dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga mereka dapat hadir dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari Dusun Seberang Jaya itu sendiri. Selain itu untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, saya juga memberitahukan kepada pemborong untuk dapat mencantumkan papan informasi pembangunan sehingga dapat dilihat oleh masyarakat".

Hal senada juga disampaikan oleh Hipni Ariyanto selaku Sekretaris Dusun Seberang Jaya. beliau mengatakan bahwa:

"...dalam setiap pelaksanaan penyusunan kegiatan pemerintah dusun seperti halnya terkait dengan penyusunan penggunaan dana desa maka kami selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jadwal kegiatan penyusunan tersebut. Hal ini kami lakukan agar masyarakat dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dusun. Kemudian pada saat kegiatan dilaksanakan kami juga berupaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jumlah anggaran yang digunakan serta standar kualitas dari pembangunan itu sendiri. Adapun hal tersebut kami sampaikan melalui papan

informasi pembangunan”.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ida Yani selaku Kepala Seksi Pemerintahan Dusun Seberang Jaya. beliau mengatakan bahwa:

“...bentuk transparansi pemerintah Dusun Seberang Jaya dalam penggunaan anggaran dana desa adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jadwal penyusunan RKP Dus dan APBDus. Hal ini kami lakukan agar masyarakat dapat mengikuti setiap tahapan dari kegiatan ini dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari Dusun Seberang Jaya. Selain itu pada setiap kegiatan pembangunan selalu berikan papan informasi terkait dengan jumlah anggaran dan standar kualitas pembangunan”.

Hal senada juga disampaikan oleh Epi Riswanto selaku Ketua BPD Dusun Seberang Jaya beliau mengatakan bahwa:

“...dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya harus transparan sehingga tidak menimbulkan prasangka dan praduga di masyarakat. Maka dari pada itu hal yang saya lakukan terkait dengan penggunaan dana desa adalah dengan cara menghimbau kepada pemerintah dusun untuk dapat menyertakan masyarakat dalam setiap kegiatan penyusunan kegiatan pembangunan dusun serta juga menghimbau pada pemerintah dusun untuk dapat memasang papan informasi pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dusun seberang jaya sudah berupaya untuk melibatkan masyarakat pada setiap pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jadwal penyusunan kegiatan pembangunan dusun dan telah berupaya untuk memberikan informasi kegiatan pembangunan melalui papan informasi pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui apa saja yang telah disampaikan oleh perangkat dusun.

Maka peneliti melakukan wawancara dengan Heri Wahyudi selaku masyarakat Kampung Palo Rantau Dusun Seberang Jaya, mengatakan bahwa:

“...dalam penggunaan dana desa pemerintah Dusun Seberang Jaya selalu memberitahukan kami tentang jadwal penyusunan kegiatan pembangunan. Sedangkan pada setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di kampung Palo Rantau belum semua kegiatan dilengkapi oleh papan informasi. Hal ini dapat dibuktikan pada saat pembangunan drainase yang tidak dilengkapi dengan informasi, namun untuk pembangunan jalan sudah dipasang dengan papan informasi”.

Hal senada juga disampaikan oleh Robi Hajni selaku masyarakat Kampung Palo Rantau Dusun Seberang Jaya, mengatakan bahwa:

“...berkaitan dengan jadwal penyusunan kegiatan pembangunan dusun pada saat itu saya diundang oleh pemerintah dusun untuk dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Kemudian kalau untuk masalah pelaksanaan kegiatan setau saya sudah dilengkapi papan informasi pembangunan, akan tetapi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase saya rasa papan informasi tidak dipasang oleh pemborong”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gunawan selaku masyarakat Kampung Pulau Dusun Seberang Jaya, mengatakan bahwa:

“...pada saat pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan

dusun, waktu itu saya tidak mendapatkan informasi terkait dengan jadwal tersebut. Pemerintah dusun sendiri tidak ada memberikan informasi ataupun undangan kepada saya untuk dapat hadir pada kegiatan tersebut. Kemudian kalau untuk informasi pembangunan setau saya setiap pembangunan yang dilakukan khususnya di kampung pulau selalu dilengkapi dengan papan informasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo belum mengacu pada salah satu prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan belum semua masyarakat mengetahui tentang jadwal penyusunan kegiatan pembangunan dusun karena pemerintah dusun belum menyampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan terkait dengan jadwal tersebut. Selain itu pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintah dusun juga belum mencamtumkan papan informasi pada semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

2. Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat

Sububungan dengan penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintah dusun maka dari pada itu peneliti melakukan pembatasan masalah dengan mengkaji tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dusun. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Marlina selaku Datin Dusun Seberang Jaya mengatakan bahwa:

“...dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dusun khususnya terkait dengan penggunaan dana desa adalah dengan menjelaskan kepada masyarakat pada musyawarah dusun terkait dengan peruntukan dana desa itu sendiri. Dengan demikian diharapkan mereka dapat memahami prosedural tentang penggunaan dari dana desa tersebut”.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ida Yani selaku Kepala Seksi Pemerintahan Sekretaris Dusun Seberang Jaya mengatakan bahwa:

“...salah satu bukti meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat adalah dengan berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan dusun. Salah satu bentuk bertambahnya pengetahuan tersebut adalah dengan memberikan gagasan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah dusun sehingga dari sumbangan pemikiran tersebut nantinya akan menjadi bahan kami untuk daevaluasi kami untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik. Maka dari pada itu dalam rangka agar masyarakat dapat menyampaikan gagasan tersebut maka pada setiap kegiatan musyawarah dusun kami selalu berupaya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait peruntukan dana desa tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dusun Seberang Jaya sudah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dusun khususnya terkait dengan penggunaan dana desa dengan memberikan penjelasan peruntukan dana desa pada setiap musyawarah dusun. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengetahui bentuk penyampaian pemerintah dusun kepada masyarakat terkait dengan peruntukan dana desa

Maka peneliti melakukan wawancara Redo Sucipto selaku masyarakat Kampung Sungai Raman Dusun Seberang Jaya, dan beliau mengatakan bahwa:

“...memang pemerintah dusun pada setiap penyelenggaraan musyawarah dusun sudah menjelaskan terkait dengan peruntukan dari berbagai dana yang didapatkan oleh dusun. Akan tetapi, penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah dusun khususnya peruntukan dana desa menurut saya hanya berlaku secara umum karena apa yang disampaikan tersebut hanya memuat tentang kegunaan dana desa itu sendiri. Sedangkan masyarakat sendiri membutuhkan penjelasan yang lebih detail baik itu tentang bagaimana cara penggunaan dana desa tersebut, ataupun apa saja yang harus dibuat untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat saya katakan bahwa penyampaian tersebut belum sepenuhnya membuat kami mengerti ataupun memahami tentang peruntukan dana desa tersebut”.

Hal senada juga disampaikan oleh Alex Sandra selaku masyarakat Kampung Pulau Dusun Seberang Jaya, dan beliau mengatakan bahwa:

“...setiap penyelenggaraan musyawarah dusun, pemerintah dusun selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang ada di dusun Seberang Jaya khususnya dalam penggunaan dana desa. Dalam penyampaiannya pemerintah dusun selalu menjelaskan kegunaan dana desa namun, penjelasan tersebut tidak serta merta dapat meningkatkan pemahaman kami karena penyampaian tersebut hanya berlaku secara umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang penting seperti proses tahapan penyusunan anggaran, proses rekrutmen tenaga kerja, proses pengadaan material dan berbagai kegiatan lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo belum mengacu pada salah satu prinsip transparans yaitu bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dusun karena pemerintah dusun Seberang Jaya dinilai belum mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah dusun khususnya dalam memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan pembangunan dusun dengan menggunakan dana desa karena pemerintah dusun hanya memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan dana desa dan tidak menjelaskan secara terperinci mengenai peruntukan dana desa itu sendiri.

3. Adanya Akses pada Informasi

Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu maksudnya adalah pemerintah desa dapat menyediakan akses untuk masyarakat terkait dengan informasi tentang penggunaan dana desa. Penggunaan dana tersebut mencakup pada kesesuaian anggaran dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Marlina selaku Datin Dusun Seberang Jaya beliau mengatakan bahwa:

“...pada dasarnya apabila rencana kegiatan pembangunan dusun yang menggunakan dana desa telah selesai dibahas ataupun kegiatannya telah dilaksanakan maka informasi tersebut harus disampaikan kepada masyarakat, baik itu informasi terkait dengan rencana prioritas pembangunan dusun ataupun jumlah anggaran yang telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dusun. Akan tetapi, pada pelaksanaannya belum dapat kami lakukan dengan optimal mengingat kami masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana untuk menghadirkan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

sehingga mereka dapat memperoleh informasi-informasi yang mereka butuhkan”.

Hal senada juga disampaikan oleh Hipni Ariyanto selaku Sekretaris Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, dan beliau mengatakan bahwa:

“...salah satu langkah yang kami lakukan untuk memberikan informasi yang cepat, mudah dijangkau, ataupun tepat waktu kepada masyarakat adalah dengan membuat papan informasi terkait dengan penggunaan dana desa. Adapun papan informasi ini selalu kami buat setiap 6 bulan sekali untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sejauhmana program pembangunan dusun telah dilaksanakan.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Dusun Seberang Jaya sudah berupaya untuk memberikan akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dengan cara mencantumkan kegiatan pembangunan pada papan informasi APBDus. Akan tetapi pencantuman yang dilakukan hanya sebatas jumlah anggaran dan persentase perkembangan pembangunan dusun. Selain itu pemerinah dusun seberang jaya juga sudah berupaya untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk lebih mempermudah masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terkendala dengan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Redo Sucipto selaku masyarakat Kampung Sungai Raman Dusun Seberang Jaya, dan beliau mengatakan bahwa:

“...pemerintah Dusun Seberang Jaya dapat dikatakan transparan atau terbuka dengan masyarakat apabila dapat memberikan informasi yang mudah diakses, mudah dijangkau ataupun dapat diperoleh dimana saja. Akan tetapi, pada pelaksanaannya kami hanya dapat memperoleh infomrasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan dusun pada papan APBDus Dusun Seberang Jaya. Akan tetapi pada kenyataannya papan APBDus tidak mencantumkan semua informasi yang kami butuhkan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan. Akan tetapi hanya mencantumkan seluruh dana secara keseluruhan”.

Hal senada juga disampaikan oleh Alex Sandra selaku masyarakat Kampung Pulau Dusun Seberang Jaya, dan beliau mengatakan bahwa:

“...kalau menurut saya saat ini pemerintah Dusun Seberang Jaya belum dapat memberikan informasi-informasi terkait dengan kegiatan pembangunan dusun yang menggunakan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan kami masih mengalami kesulitan untuk dapat memperoleh data Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan dusun. Saat ini kami hanya dapat memperoleh jumlah dari anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan melalui papan informasi APBDus”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo belum mengacu pada salah satu prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat masih mengalami kesulitan untuk memperoleh atau mengakses informasi secara siap, mudah dan tepat waktu terkait dengan rencana

anggaran kegiatan pembangunan dusun. Pemerintah dusun seberang jaya hanya memberikan informasi jumlah keseluruhan anggaran melalui papan informasi APBDus dan belum dapat memanfaatkan teknologi informasi guna memenuhi semua kebutuhan informasi yang diinginkan masyarakat karena masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana lainnya.

4. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan khususnya kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dusun. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Heri Wahyudi selaku masyarakat Kampung Palo Rantau Dusun Seberang Jaya, mengatakan bahwa:

“...kalau berkaitan dengan kegiatan pembangunan dusun, kami selaku masyarakat kurang mempercayai pemerintah dusun. Hal ini tidak terlepas adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah dusun. Hal ini dapat dibuktikan dengan kami masih kesulitan mendapatkan informasi secara terperinci terkait dengan anggaran biaya pada setiap kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Sebagai contoh pemerintah dusun Seberang Jaya pada tahun 2020 hanya dapat memberikan informasi terkait dengan jumlah APBDus secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 1.567.770.116 dan begitupun dengan dana desa hanya diberikan informasi jumlah dana desa tersebut yaitu sebesar Rp. 761.573.000,-. Dengan demikian apabila hanya itu yang dilakukan oleh pemerintah dusun Seberang Jaya maka kami selaku masyarakat tentu akan berspekulasi bahwa anggaran sebesar tersebut rentan untuk diselengkawakan mengingat pemerintah dusun belum ada memberikan informasi terkait dengan peruntukan dana desa tersebut”.

Hal senada juga disampaikan oleh Robi Hajni selaku masyarakat Kampung Palo Rantau Dusun Seberang Jaya, mengatakan bahwa:

“...anggaran dana desa setau saya diperuntukan untuk pembangunan dusun yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, besarnya dana ini rentan dilakukan penyelewengan oleh pemerintah. Jadi kalau untuk kepercayaan saya sendiri kepada pemerintah dusun, saya rasa sudah berkurang. Hal ini tidak terlepas dari sikap pemerintah dusun yang cenderung menutupi informasi-informasi yang kami inginkan terkait dengan peruntukan dana desa”.

Hal senada juga disampaikan oleh Pramudia Saputra selaku masyarakat Kampung Pulau Dusun Seberang Jaya, mengatakan bahwa:

“...sikap pemerintah dusun yang cenderung menutupi berbagai informasi yang dibutuhkan menimbulkan prasangka dan praduga oleh masyarakat terutama berkaitan dengan peruntukan penggunaan dana desa. Hal ini dicurigai dengan berbagai kegiatan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sehingga hal ini membuat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah dusun”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo belum mengacu pada salah satu prinsip transparansi. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

penyelenggaraan kegiatan pembangunan dusun. Hal ini disebabkan oleh pihak pemerintah dusun cenderung masih menutupi berbagai informasi kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Suhubungan dengan penelitian ini membahas tentang pembangunan dusun maka dari pada itu peneliti melakukan pembatasan masalah dengan mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dusun. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Marlini selaku Datin Dusun Seberang Jaya beliau mengatakan bahwa:

“...kalau untuk partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dusun, saya rasa saat ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam memberikan pendapat terkait dengan apa-apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dusun. Begitu juga pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat juga turut andil dalam mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dusun. Selain itu pada tahap evaluasi masyarakat bersama dengan BPD juga melakukan pemeriksaan terkait dengan hasil atau kualitas pembangunan yang ada di dusun Seberang Jaya”.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ida Yani selaku Kepala Seksi Pemerintahan Sekretaris Dusun Seberang Jaya beliau mengatakan bahwa:

“...sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dusun sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang sudah berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan dusun baik itu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan masyarakat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan apa saja yang menjadi kebutuhan pembangunan dusun. Sedangkan pada tahap pelaksanaan masyarakat juga sering turun langsung untuk memeriksa kegiatan pembangunan tersebut serta pada tahap evaluasi masyarakat juga berperan serta dalam rangka memberikan penilaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan guna memastikan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dusun menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dusun sudah meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada saat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dusun.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dengan melakukan wawancara dengan Redo Sucipto selaku masyarakat Kampung Sungai Raman Dusun Seberang Jaya, dan beliau mengatakan bahwa:

“...memang pada saat ini kami selalu berupaya untuk hadir pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dusun, khususnya pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dusun. Hal ini kami lakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang dikerjakan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah dusun”.

Hal senada juga disampaikan oleh Alex Sandra selaku masyarakat Kampung

Pulau Dusun Seberang Jaya, dan beliau mengatakan bahwa:

“...sebagaimana kita ketahui penggunaan anggaran dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan dusun sangat rentan disalahgunakan maka dari pada itu bentuk kepedulian kami terhadap dusun untuk adalah dengan turut serta mengawasi setiap kegiatan pembangunan dusun baik itu tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun evaluasi kegiatan pembangunan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dusun cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap dusun. Meningkatnya kepedulian ini sebagai salah satu faktor menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dusun sehingga masyarakat cenderung lebih aktif dalam mengawasi setiap kegiatan pembangunan dusun seperti perencanaan, pelaksanaan, ataupun tahap evaluasi.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat sebagai antisipasi terjadinya penyelewengan anggaran pembangunan oleh pemerintah dusun

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: bahwa pemerintah Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo pengelolaan dana desa belum mengacu prinsip transparansi penggunaan dana desa. Hal ini terlihat dari belum semua masyarakat mengetahui tentang jadwal penyusunan kegiatan pembangunan dusun dan masih terdapat kegiatan pembangunan dusun tidak dilengkapi dengan papan informasi pembangunan. Selain itu masyarakat masih mengalami kesulitan untuk memperoleh atau mengakses informasi secara siap, mudah dan tepat waktu terkait dengan rencana anggaran kegiatan pembangunan dusun. Pemerintah dusun Seberang Jaya hanya memberikan informasi jumlah keseluruhan anggaran melalui papan informasi APBDus dan belum dapat memanfaatkan teknologi informasi guna memenuhi semua kebutuhan informasi yang diinginkan masyarakat karena masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana lainnya. Dengan demikian adanya sikap tertutup dari pemerintah dusun membuat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dusun.

Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Peneliti dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penelitian ini, lebih khusus ucapan terima kasih kepada:

1. Hasdani, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bungo.
2. Marlina dalam hal ini sebagai Datin Rio Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo dan jajaranya.
3. Epi Riswanto dalam hal ini sebagai Ketua BPD Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo dan Anggota.
4. Masyarakat Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku-Buku

- Atmadja, A. T. *et. al.* (2013). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*

Jurnal

Ayumiati, *et. al.* (2019). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun*. Banda Aceh: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 3 No. 2.